

BAB IV

ANALISIS

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Black Market

Persoalan manusia yang berhubungan dengan urusan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi manusia tersebut. Apabila kemaslahatan ini tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Islam perlu memberikan perhatian terhadap berbagai kemaslahatan manusia tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam syariat Islam, hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan analisis berdasarkan hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Konsumen tentang jual beli handphone BM yang terjadi di Pasar Singosaren.

1. Analisis Cara mendapatkan handphone black market

Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa mendapatkan atau memperoleh handphone tersebut melalui distributor resmi yang masih berupa mesin handphone, kemudian dirakit sendiri. Karena dirakit sendiri handphone tersebut tidak didaftarkan ke Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, sehingga tidak dikenai pajak penjualan, dan mengakibatkan kerugian kepada Negara. Hal ini diperparah dengan

kebiasaan masyarakat sekarang pada umumnya, mereka ingin memiliki sesuatu yang menjadi kebutuhan, meskipun dengan jalan melawan hukum.

Dalam kajian ushul fiqh dijelaskan bahwa, sesuatu tidak akan dilarang atau diharamkan kecuali karena sesuatu itu mengandung bahaya dan kerugian bagi kehidupan manusia.³⁹

2. Analisis terhadap subyek dan obyek jual beli

Dalam Bab II telah penulis paparkan tentang syarat-syarat dalam jual beli, yang diantaranya adalah penjual dan pembeli. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh di lapangan, bahwa kedua orang yang melakukan transaksi dalam pelaksanaan jual beli ini pada dasarnya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam hukum Islam.

Yaitu kedua belah pihak telah memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil balig serta berkemampuan memilih. Karena tidak syah jual beli yang dilakukan anak kecil atau orang yang berada di bawah pengampuan.

Selain itu kedua belah pihak, baik pihak penjual dan pembeli juga telah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga tindakannya tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

وَأَلْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ

³⁹ Sartia Effendi, M. Zain, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hal. 54.

Artinya: *bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri* [Q.S Al-Qiyaamah (75): 14]

Objek jual beli tersebut harus halal, bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak, Begitupun dengan objek yang diperjual belikan, yaitu berupa handphone. Seperti kriteria yang disebutkan di atas bawa handphone adalah suatu benda yang banyak sekali manfaatnya untuk kemaslahatan manusia pada umumnya. Handphone juga bukan barang yang najis untuk diperjual belikan, dan tentunya sudah menjadi hak milik dari para penjual atau konter di Pasar Singosaren sudah membeli handphone tersebut dari pemasok dengan cara memesannya, kemudian setelah barang datang kemudian dibayar.

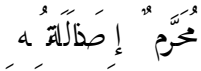
Imam Syafi'i berpendapat bahwa segala bentuk jual beli hukumnya sah, apabila di dalam jual beli tersebut terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Adanya kemungkinan tujuan tersembunyi dibalik lahiriyah dari kedua belah pihak, karena tidak dapat dipastikan, tidak akan mempengaruhi kepada sahnya akad jual beli tersebut.⁴⁰

Akan tetapi Apabila handphone tersebut diperjual belikan maka banyak sekali akibat yang ditimbulkan dan mengandung kemudharatan negara dalam sektor perpajakan, dapat merusak mental para pelaku usaha dan para konsumen serta dapat merusak mekanisme pasar handphone. Maka hukum jual beli ini adalah *al-Muharram li Gairihi*, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya, karena secara esensial tidak

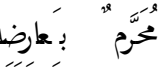
⁴⁰ *Ibid.*, hal 175.

mengandung kemudharatan, namun dalam kondisi tertentu sesuatu itu dilarang karena adanya pertimbangan eksternal atau perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai perantara kepada sesuatu yang diharamkan.⁴¹

Esensi haram itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. 

Yaitu haram yang telah ditetapkan bagi dzatnya. Haram yang seperti ini telah ditetapkan oleh syara' sejak semula. Contohnya, pekerjaan zina dan mencuri telah ditetapkan hukumnya dengan haram.

b. 

Yaitu haram yang mendatang. Perbuatan haram yang mendatang contohnya seperti melaksanakan shalat di atas tikar yang dicuri dan jual beli dengan cara penipuan.

Pekerjaan shalat dan jual beli menurut ajaran Islam (*syara'*) bukanlah haram, tetapi karena adanya faktor curian dan tipuan masuk atau datang kemudian maka hukumnya berubah menjadi haram, dan pengharaman seperti di atas disebut "*Muharramun Bi'aridin*" atau haramnya sesuatu itu karena adanya unsur lain yang datang

⁴¹ *Ibid.*, hal 57.

kemudian.⁴² Jadi pada dasarnya esensi “*Muharramun Bi’aridin*” sama dengan “*Muharramun li Ghairihi*”.

Apabila suatu perbuatan diperselisihkan haram atau boleh, maka hendaklah dipandang kemudaratannya dan kemanfaatannya. Bila kemudharatannya lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatan itu terlarang, begitupun sebaliknya.

Apabila di dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau mashlahat, namun di situ mungkin terdapat kerusakan, dalam hal ini haruslah didahulukan menghilangkan kerusakan, agar jangan sampai meluas.

دُرُّ الْمَ غَاسِدُهُ دَمٌ مِّنْ جَلْبِ الْمَ صَاحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari kemaslahatan”⁴³

3. Analisis Pelaksanaan Akad Jual Beli

Akad jual beli handphone black market yang dilakukan oleh masyarakat muslim atau non muslim dilakukan menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.

Contoh dari ungkapan itu seperti “tak tuku hape mu sak juta yo ? (aku beli handphonemu sejuta ya ?)” kemudian dijawab dengan ungkapan

⁴² Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali, 1993, hal. 157-158

⁴³ *Ibid.*, hal. 125.

“yo wes ra popo (ya sudah tidak apa-apa)” tentunya hal tersebut sebelumnya sudah terjadi tawar-menawar. Setelah adanya pernyataan tersebut maka terwujudlah suatu akad jual beli tadi. Dan jual beli tersebut mempunyai kepastian hukum (sah hukumnya).

Terjadinya akad tersebut juga menandakan bahwa antara penjual dan pembeli sudah saling merelakan. Karena selain akad, dalam jual beli juga harus dilakukan dengan jalan saling rela antara kedua belah pihak, karena apabila salah satu pihak ada yang merasa terpaksa atau dipaksa, karena akan berakibat jual beli tersebut tidak sah atau batal. Sesuai dengan firman Allah SWT surat An-Nissa (4) ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.*

4. Analisis Terhadap Akibat

Setelah penulis mendapat keterangan dari hasil observasi dan wawancara mengenai bagaimana memperoleh hingga menjual handphone BM ini maka bisa diketahui akibat yang ditimbulkan dari jual beli handphone BM sangat besar di antaranya yaitu pertama, karena penjualan handphone ini tidak dikenai pajak penjualan otomatis negara akan

dirugikan khususnya dalam sektor perpajakan, kedua akan mengganggu stabilitas pasar handphone.

Adanya peraturan negara yang mengatur perpajakan suatu barang yang masuk ke wilayah Negara adalah untuk menambah pendapatan negara dalam sektor perpajakan yang mana mempunyai tujuan lain yaitu untuk tetap melindungi pedagang lokal, kesetabilan pasar dan kemaslahatan social yang lebih besar. Dengan banyaknya penyelundupan dan pasar gelap maka menunjukkan adanya sikap tidak patuh kepada aturan atau undang-undang negara. Dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 59 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.

Dari ayat diatas jelas menyuruh kita untuk menaati Allah, para rosul utusan Allah dan para pemimpin-pemimpin yang baik dan mengajak kebaikan diantara kamu. Maka apabila kita melanggar aturan pemimpin atau Negara yang memang memiliki tujuan baik dan kemaslahatan yang besar maka kita berdosa karna sikap yang tidak taat tersebut bisa merusak hak dan mendzalimi orang lain dan itu dilarang agama.

B. Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Handphone Black Market

Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

1. Analisis Transaksi

Telah disebutkan dalam bab III di atas tentang penawaran yang dilakukan penjual terhadap konsumen yang dengan sengaja tidak memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur tentang handphone yang dijual. Hal ini menunjukkan bahwa penjual tidak memiliki itikad baik dalam bertransaksi dengan melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan juga berusaha mengelabui pembeli yang tidak tahu

dengan dalih barang yang mereka jual adalah barang baru dan asli walau sejatinya handphone yang mereka tawarkan adalah handphone BM yang kualitasnya tidak sebaik handphone baru semestinya atau yang asli. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen untuk tetap membeli dengan menawarkan harga yang miring atau lebih murah dari handphone asli “resmi” yang beredar dipasaran. Jika melihat kewajiban pelaku usaha pada pasal 7 huruf b “*memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan*”, maka bagi pelaku usaha yang tidak menunaikan kewajibannya secara otomatis melanggar hak konsumen yang seharusnya mendapatkan informasi yang lengkap dan benar.

2. Analisis Terhadap Objek Jual Beli

Barang atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Telah dijelaskan asal handphone BM bias dari penyelundupan dan proses daur ulang (rekondisi) handphone rusak atau bekas menjadi seperti baru yang kemudian dipasarkan melalui pasar gelap (Black Market), jika para pelaku baik penjual maupun pembeli menyadari ini maka sebenarnya transaksi jual beli handphone BM ini sangatlah beresiko dan tidak layak untuk diperdagangkan.

Meninjau handphone BM hasil proses daur ulang ini tentunya penjual berkewajiban memberikan informasi secara lengkap dan benar tentang kondisi dan kualitas barang. Telah disebutkan dalam pasal 8 Undang-undang perlindungan konsumen tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, diantaranya yaitu pelaku usaha dilarang menjual barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau manfaat seperti dinyatakan dalam label, etiket dan keterangan barang, dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar, dan lain-lain.

Pada pasal 8 huruf j juga menyatakan bahwa seorang pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada kenyataannya handphone BM ini tidak menyertakan buku panduan penggunaan berbahasa Indonesia dalam kemasan dosbook.

Analisis ini juga berkenaan dengan layanan purna jual soal garansi dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh produsen atau penjual kepada konsumennya dan tanggung jawab penjual dalam memenuhi hak konsumen, terutama hak untuk memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan. Konsumen

tidak boleh ditipu memperoleh barang kualitas tertentu, padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal 25 UUPK menyatakan, bahwa pelaku usaha memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya satu tahun, namun kebanyakan penjual handphone BM hanya memberikan waktu garansi hanya satu minggu sampai satu bulan saja, tentu dengan hanya rentan waktu yang pendek tidak dapat menjamin keawetan barang tersebut. Biasanya setelah waktu garansi habis konsumen yang ingin klaim kerusakan maka harus tetap membayar biaya reparasi atau perbaikan karena masa garansi sudah lewat, hal ini tentu sangat merugikan konsumen.

3. Analisis Sanksi

Aturan mengenai sanksi-sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat ditemukan dalam bab XIII Undang-undang Perlindungan Konsumen, dari pasal 60 sampai dengan pasal 63.⁴⁴

Adapun sanksi yang dapat dikenakan terdiri dari:

- a. Sanksi Administrasi
- b. Sanksi pidana pokok

⁴⁴ Abdullah Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, kajian teori dan Perkembangan pemikiran, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008, hal. 100.

c. Sanksi pidana tambahan

Sanksi administrative dijatuhkan terhadap para pelaku usaha yang melanggar:

- a. Tidak melaksanakannya ganti rugi dalam bentuk uang ataupun penggantian barang.
- b. Pelaku usaha yang tidak yang tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan purna jual, baik dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharannya (service).

Namun dalam hal ini pelaku usaha telah melakukannya dengan memberikan pelayanan pemeliharaan dan ganti rugi walaupun menggunakan garansi personal atau garansi toko.

Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum atas pelanggaran pelaku usaha. Undang-undang tentang perlindungan konsumen memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usaha atau pengurusnya. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan pasal 17 dipidana penjara

paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Adapun sanksi pidana tambahan sesuai dengan pasal 62 adalah:

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pembayaran ganti rugi
- c. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- d. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- e. Pencabutan izin usaha